



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN

Nomor: 3/PENG/PIM/RH.04.01/03/2025

TENTANG PENERIMAAN USULAN CALON HAKIM AD HOC HAK ASASI MANUSIA DI MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2025

Memenuhi permintaan Mahkamah Agung RI sesuai Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 31/WKMA.NY/KP1.1.1/II/2025 tentang Pengisian Kekosongan Jabatan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI, Komisi Yudisial mengundang warga negara terbaik untuk menjadi **Calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia** yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun;
4. Berpendidikan paling rendah Strata Satu (S-1) Sarjana Hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
5. Sehat jasmani dan rohani;
6. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
7. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
8. Memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang Hak Asasi Manusia.

Pendaftaran Calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia di Mahkamah Agung RI dilakukan secara daring melalui laman **rekrutmen.komisiyudisial.go.id** dimulai tanggal 6 sampai dengan 27 Maret 2025 Pukul 24.00 WIB. Berkas persyaratan yang harus disiapkan calon adalah sebagai berikut:

1. Surat pendaftaran Calon Hakim *ad hoc* HAM di Mahkamah Agung;
2. Daftar riwayat hidup, termasuk riwayat pekerjaan dan pengalaman organisasi, dibuat diatas kertas bermaterai;
3. Kartu Tanda Penduduk;
4. Surat keterangan sehat jasmani dari dokter pemerintah;
5. Fotokopi Ijazah Strata-1 sampai dengan pendidikan terakhir beserta transkrip nilai yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
6. Surat pernyataan berpengalaman dalam bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, dibuat diatas kertas bermaterai;

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450

Telp.: 021-3905876-77, 3906178, Fax: 021-3906215

Website: www.komisiyudisial.go.id Email: komisi@komisiyudisial.go.id
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

7. Surat keterangan dari pengadilan negeri setempat bahwa calon tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh keputusan hukum tetap;
8. Surat rekomendasi paling sedikit dari 3 (tiga) orang yang mengetahui dengan baik integritas, kualitas, dan reputasi;
9. Surat pernyataan tidak akan menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik jika terpilih menjadi hakim Ad Hoc HAM di MA, dibuat diatas kertas bermaterai;
10. Tanda terima penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
11. Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;
12. Pasfoto terbaru (dengan latar belakang warna merah) berukuran maksimal 100 kb diunggah di laman pendaftaran rekrutmen.komisiyudisial.go.id.

Berkas terkait persyaratan dipindai dan disimpan dalam format PDF kemudian diunggah di laman rekrutmen.komisiyudisial.go.id paling lambat tanggal 27 Maret 2025.

Seleksi dilakukan secara bertahap, meliputi: seleksi administrasi, seleksi kualitas, seleksi kesehatan dan kepribadian, dan wawancara.

Ketentuan lain-lain :

1. Panitia Seleksi **tidak menerima pendaftaran secara langsung** di Kantor Komisi Yudisial. Pertanyaan terkait pendaftaran secara daring dan proses seleksi dapat disampaikan melalui alamat surat elektronik rekrutmen@komisiyudisial.go.id atau fasilitas chat online di laman rekrutmen.komisiyudisial.go.id;
2. Berkas pengusulan yang sudah dikirim kepada Panitia Seleksi tidak dapat dikembalikan;
3. Peserta seleksi yang memenuhi persyaratan administratif akan dipanggil untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya;
4. Dalam proses seleksi, peserta tidak dipungut biaya apapun;
5. Peserta seleksi diminta untuk mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu keberhasilan/kelulusan dalam proses seleksi;
6. Formulir-formulir surat pernyataan dan daftar riwayat hidup dapat diunduh di laman rekrutmen.komisiyudisial.go.id setelah menyelesaikan pengisian data pendaftaran.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Maret 2025

Ketua,



Amzulian Rifai